

## Audit Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes di Desa Pematang Serai, Tanjung Pura

Yulisfan<sup>1\*</sup>, Irsan Nasution<sup>2</sup>, Ahmad Braja Bayu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jenderal Gatot Subroto KM. 4,5, Sumatera Utara

E-mail: [yulisfan@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:yulisfan@dosen.pancabudi.ac.id)

\* Corresponding Author

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5122>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 25 Dec 2025

Revised: 08 Jan 2026

Accepted: 21 Jan 2026

#### Kata Kunci:

BUMDes, Audit Internal, Manajemen Keuangan, Pelayanan Masyarakat, Akuntabilitas.

#### Keywords:

BUMDes, Internal Audit, Financial Management, Community Service, Accountability.



### ABSTRACT

Pengelolaan keuangan BUMDes yang akuntabel dan transparan penting untuk keberlanjutan usaha dan kepercayaan masyarakat, namun masih banyak BUMDes yang belum memiliki sistem pengendalian dan audit internal memadai. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan BUMDes melalui penerapan sistem audit internal yang sederhana, partisipatif, dan sesuai karakteristik desa. Kegiatan dilaksanakan di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan melibatkan pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi kelompok, pendampingan penyusunan sistem audit internal dan SOP keuangan, serta pelaksanaan audit internal. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan audit internal, serta dihasilkan dokumen sistem audit internal, SOP, dan format laporan keuangan berkelanjutan. Program ini juga meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga membentuk pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

*Accountable and transparent financial management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is crucial for business sustainability and public trust, yet many BUMDes lack adequate internal audit and control systems. This community service program aims to strengthen BUMDes financial governance through the implementation of a simple, participatory, and village-specific internal audit system. The program was conducted in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency, involving BUMDes administrators, village officials, and the community. The methods used included outreach, group discussions, mentoring in the development of internal audit systems and financial SOPs, and the implementation of internal audits. The results demonstrated an increase in administrators' understanding and skills in recording transactions, preparing financial reports, and internal audits. The program also produced documents on internal audit systems, SOPs, and sustainable financial reporting formats. The program also increased community participation and awareness of transparency and accountability, leading to more open and responsible BUMDes financial management.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Yulisfan, et al (2026). Audit Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes di Desa Pematang Serai, Tanjung Pura, 4(3) 18177-18183. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5122>

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional Indonesia karena desa memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk sebagai instrumen kelembagaan ekonomi desa yang berfungsi mengelola potensi lokal secara

produktif dan berkelanjutan. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 2021; Sari et al., 2024). Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan fungsi tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak BUMDes masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola organisasi. Permasalahan yang umum terjadi meliputi rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta belum optimalnya penerapan sistem pengendalian internal yang memadai (Kementerian Keuangan, 2022). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan berpotensi menghambat keberlanjutan usaha desa. Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik, karena pengelolaan anggaran publik yang tidak terbuka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berisiko menimbulkan penyimpangan dan merugikan kepentingan masyarakat luas (Sayuti et al., 2018).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes mengacu pada keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, sedangkan akuntabilitas mencerminkan kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana dan hasil usaha yang diperoleh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya pemahaman terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi faktor utama penyebab rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas BUMDes (Dewi & Kurniawan, 2018).

Kondisi tersebut juga ditemukan pada BUMDes di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Meskipun BUMDes di desa ini cukup aktif dalam mengelola beberapa unit usaha, pengelolaan keuangan yang dilakukan belum didukung oleh sistem audit internal yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelaporan keuangan belum disusun secara standar, dokumentasi transaksi belum tertata dengan baik, serta mekanisme pengawasan internal masih lemah. Selain itu, keterbatasan kompetensi pengelola di bidang akuntansi dan pengawasan keuangan turut meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan ketidaktepatan dalam pelaporan keuangan.

Audit internal merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Audit internal didefinisikan sebagai proses sistematis dan independen untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi (A. A. Arens & Dkk, 2015). Dalam konteks BUMDes, audit internal berperan dalam mengidentifikasi kelemahan pengelolaan keuangan, mendeteksi potensi penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat konstruktif. Selain sebagai alat pengawasan, audit internal juga memih (Mardiasmo, 2018) memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan pemahaman pengelola terhadap prinsip akuntabilitas publik dan integritas pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018).

Urgensi penerapan audit internal pada BUMDes sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa. Namun, tanpa mekanisme audit yang memadai, pelaporan keuangan berpotensi hanya bersifat administratif dan belum mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penguatan audit internal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung penerapan prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997), yang menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada peran audit internal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pematang Serai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian tata kelola keuangan BUMDes serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif berbasis pemberdayaan masyarakat (*community-based empowerment*), yang menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mitra

melalui proses pembelajaran langsung, pendampingan, serta keterlibatan aktif dalam perencanaan dan implementasi program. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam mendorong perubahan perilaku, meningkatkan rasa memiliki terhadap program, serta menjamin keberlanjutan hasil kegiatan (Chambers, 1997; Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato., 2015).

Tahap awal penelitian dilakukan melalui identifikasi masalah dan kebutuhan mitra dengan menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada pengurus BUMDes dan perangkat desa. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kondisi pengelolaan keuangan, sistem pelaporan, mekanisme pengawasan, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Identifikasi kebutuhan merupakan langkah penting dalam pendekatan pemberdayaan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan konteks lokal dan permasalahan nyata yang dihadapi mitra (Sugiyono, 2019).

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan penyadaran kepada pemangku kepentingan desa, yang meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, dan perwakilan masyarakat. Sosialisasi difokuskan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan audit internal dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif serta dukungan kelembagaan terhadap penerapan sistem pengawasan internal. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola sektor publik yang baik.

Pelatihan dan penguatan kapasitas (*capacity building*) diberikan kepada pengurus BUMDes dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Materi pelatihan meliputi prinsip dasar tata kelola keuangan desa, teknik pencatatan keuangan sederhana, penyusunan laporan keuangan, prosedur audit internal, serta pengendalian internal dan deteksi potensi penyimpangan. Metode pelatihan menggunakan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi nyata BUMDes agar peserta dapat langsung memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Pendekatan pelatihan berbasis praktik dinilai efektif dalam meningkatkan kompetensi pengelola organisasi ekonomi desa (Rahayuningsih et al., 2019).

Selanjutnya, dilakukan penyusunan dokumen sistem audit internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan secara partisipatif bersama mitra. Penyusunan dokumen ini disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia dan karakteristik usaha BUMDes agar mudah dipahami dan dapat diterapkan secara mandiri. Audit internal dipahami sebagai proses sistematis dan independen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (R. J. Arens et al., 2017).

Tahap implementasi dilakukan melalui pendampingan langsung dalam pelaksanaan audit internal perdana pada siklus keuangan BUMDes. Pendampingan mencakup pemeriksaan dokumen keuangan, pencatatan temuan audit, penyusunan laporan hasil audit, serta pembahasan tindak lanjut perbaikan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem audit internal yang telah disusun dapat dijalankan secara nyata dan berkelanjutan. Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi (Creswell, 2014).

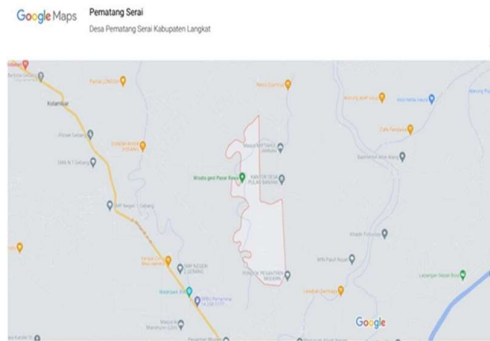
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penerapan sistem audit internal, tingkat kepatuhan terhadap SOP, serta peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, serta kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan guna mengukur perubahan pemahaman dan sikap terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari siklus program pemberdayaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan keberlanjutan program.

Sebagai tahap akhir, disusun rencana tindak lanjut bersama mitra untuk menjamin keberlanjutan penerapan audit internal dan tata kelola keuangan yang baik di BUMDes. Rencana tindak lanjut mencakup pembentukan tim audit internal desa, pelaksanaan audit secara berkala, serta integrasi pelaporan keuangan BUMDes dalam forum musyawarah desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya penguatan tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat

administratif dan teknis, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran, perubahan pola pikir, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.



Gambar 1. Peta Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat

Hasil utama yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman pengurus BUMDes terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan dan urgensi penerapan audit internal. Melalui pelatihan dan diskusi kelompok, pengurus BUMDes mulai memahami pentingnya pencatatan transaksi secara sistematis, penyusunan laporan keuangan yang tertib, serta fungsi audit internal sebagai bagian dari sistem pengendalian organisasi. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, pengelolaan keuangan BUMDes cenderung berjalan tanpa format pelaporan yang baku dan dokumentasi yang tertata. Setelah kegiatan berlangsung, pengurus BUMDes menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsi administrasi keuangan serta menyadari bahwa laporan keuangan merupakan instrumen strategis pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa dokumen sistem audit internal BUMDes yang disusun secara partisipatif dan disesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan pengelola. Sistem audit internal tersebut mencakup prosedur pemeriksaan laporan keuangan, penjadwalan audit berkala, format pencatatan temuan, serta mekanisme pelaporan hasil audit kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Keberadaan dokumen ini menjadi pedoman awal bagi BUMDes dalam melakukan evaluasi internal secara mandiri dan berkelanjutan.

Hasil lainnya adalah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes. SOP ini mengatur alur pencatatan transaksi, proses verifikasi, penyusunan laporan keuangan periodik, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Dokumen SOP tersebut telah disepakati bersama dan mulai diterapkan pada tahun anggaran berjalan. Implementasi SOP ini diharapkan dapat membentuk disiplin administrasi keuangan serta meminimalkan potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDes.

Salah satu capaian penting dari kegiatan pengabdian ini adalah terlaksananya audit internal perdana BUMDes dengan pendampingan langsung dari tim pelaksana. Audit dilakukan terhadap transaksi keuangan selama enam bulan terakhir dan menghasilkan laporan temuan beserta rekomendasi perbaikan. Laporan audit tersebut kemudian dipresentasikan secara terbuka dalam forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Pelaksanaan audit internal ini menjadi tonggak awal terbentuknya budaya transparansi dan pertanggungjawaban terbuka di lingkungan BUMDes Desa Pematang Serai.



Gambar 2. Dokumentasi Foto Bersama

Kegiatan pengabdian juga berdampak pada meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya pengawasan pengelolaan dana desa. Forum musyawarah desa pasca-audit menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pengelola BUMDes dan masyarakat. Respons positif masyarakat ditunjukkan melalui usulan agar audit internal dilakukan secara rutin dan hasilnya dipublikasikan melalui media informasi desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya menghasilkan luaran administratif, tetapi juga mendorong keterlibatan publik dalam tata kelola keuangan desa.

Lebih lanjut, kegiatan ini mendorong komitmen pemerintah desa untuk membentuk tim audit internal desa sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pengawasan. Tim tersebut direncanakan melibatkan unsur BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, audit internal tidak lagi bergantung pada pihak eksternal, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan desa yang mandiri dan berkesinambungan. Perbaikan juga terlihat pada sistem dokumentasi keuangan, di mana BUMDes mulai menerapkan pengarsipan bukti transaksi secara rapi dan menyusun laporan keuangan rutin menggunakan format standar yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan BUMDes serta memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola dana publik secara bertanggung jawab. Hasil ini diharapkan dapat menjadi model awal yang dapat direplikasi pada BUMDes lain yang menghadapi permasalahan serupa.

### ***Pembahasan***

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif yang diterapkan efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Peningkatan pemahaman pengurus terhadap audit internal sejalan dengan pandangan bahwa audit internal berperan tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan (R. J. Arens et al., 2017).

Pelaksanaan audit internal perdana dan penyusunan SOP keuangan menjadi bukti konkret bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini mendukung konsep akuntabilitas publik yang menekankan bahwa pertanggungjawaban keuangan tidak hanya berfokus pada pelaporan, tetapi juga pada proses pengelolaan yang dapat diawasi dan dipahami oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018). Transparansi yang diwujudkan melalui forum musyawarah desa turut memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi potensi konflik sosial yang kerap muncul akibat minimnya keterbukaan informasi.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola BUMDes yang berkelanjutan. Partisipasi publik yang meningkat menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya dipandang sebagai unit usaha desa, tetapi juga sebagai entitas publik yang harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, audit internal berfungsi sebagai instrumen strategis dalam penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Dari perspektif pengembangan kapasitas, kegiatan ini juga relevan sebagai sarana penerapan konsep audit internal secara kontekstual pada organisasi sektor publik skala kecil. Proses penyusunan sistem audit, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan hasil audit memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip audit internal secara nyata. Hal ini memperkuat temuan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan pendampingan langsung lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi dibandingkan pendekatan teoritis semata.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan audit internal pada BUMDes tidak hanya berdampak pada perbaikan administrasi keuangan, tetapi juga pada pembentukan budaya akuntabilitas dan transparansi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa. Program pengabdian ini menjadi bukti bahwa audit internal dapat diadaptasi secara sederhana namun efektif untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang profesional dan berkelanjutan.

### **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pematang Serai telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penerapan sistem audit internal yang sederhana, partisipatif, dan kontekstual. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan

pemahaman serta keterampilan pengurus BUMDes dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan pengawasan internal secara lebih terstruktur dan akuntabel. Pengurus BUMDes yang sebelumnya belum terbiasa dengan praktik audit internal kini telah mampu menyusun laporan keuangan menggunakan format standar serta melaksanakan audit internal secara mandiri dengan pendampingan.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa dokumen sistem audit internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, serta template laporan keuangan yang disusun secara partisipatif bersama mitra. Dokumen-dokumen tersebut disepakati untuk digunakan secara berkelanjutan sebagai pedoman pengelolaan dan pengawasan keuangan BUMDes. Proses sosialisasi dan musyawarah desa yang dilaksanakan selama kegiatan turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta mendorong munculnya komitmen pemerintah desa untuk membentuk tim pengawasan keuangan internal di tingkat desa.

Dengan mengintegrasikan pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat, program pengabdian ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai model awal yang dapat direplikasi di desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan BUMDes. Di sisi lain, kegiatan ini juga memperkuat relevansi keilmuan serta implementasi capaian pembelajaran di bidang audit internal melalui penerapan langsung konsep dan praktik audit dalam konteks organisasi sektor publik tingkat desa.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

#### **REFERENSI**

- Arens, A. A., & Dkk. (2015). *Auditing & Jasa Assurance* (Jilid 1). Erlangga.
- Arens, R. J., Elder, M. S., & Beasley, C. H. (2017). *Auditing and Assurance Services*. Pearson.
- Chambers, R. (1997). Editorial: Responsible well-being — a personal agenda for development. *World Development*, 25(11), 1743–1754. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)10001-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)10001-8)
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Dewi, K. C., & Kurniawan, P. S. (2018). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(3).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Nations, U. (1997). *Human Development Report 1997*. Human Development Reports.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (2021).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (2022).
- Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). PERAN BUMDES DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA SUKARATU KABUPATEN SERANG, BANTEN. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 80–87. <https://doi.org/10.37950/JKPD.V3I2.63>
- Sari, A., Badan Usaha Milik Desa, P., Sari, K., Perekonomian Melalui Potensi Desa Banyuasin Kembaran pengaruh badan usaha milik desa, p., & peningkatan perekonomian melalui potensi desa banyuasin kembaran andika sari dosen progdi manajemen stie rajawali, t. (2024). pengaruh badan usaha milik desa ( bumdes) “kembar sari “ terhadap peningkatan perekonomian melalui potensi desa banyuasin kembaran. *Progress*, 17(1), 22–25. <https://journal.stiera.ac.id/index.php/Progress/article/view/100>

Sugiyono. (2019). Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Alfabeta.

Totok Mardikanto, & Poerwoko Soebiato. (2015). Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta.

Sayuti, Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.57178/ATESTASI.V1I1.54>